

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA SELAT LEMBEH KECAMATAN LEMBEH SELATAN KOTA BITUNG

IMPLEMENTATION OF TOURIST DEVELOPMENT POLICIES LEMBEH STRAIT SUBTRACT SOUTHERN BITUNG CITY

Mex Iver Mapahena⁽¹⁾, Agustinus B. Pati⁽²⁾, Deysi Tampongangoy⁽²⁾

1) Staf dan peneliti pada Pemerintah Kota Bitung/ASN

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada PS Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: mexmapahena24@gmail.com

Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisocioekonomi@unsrat.ac.id

: Rabu, 10 Maret 2021

Disetujui diterbitkan

: Rabu, 28 Juli 2021

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the policy for the development of the Lembeh Strait tourism object, South Lembeh District, Bitung City. as well as to determine the factors supporting and inhibiting the implementation of the policy. The research method used in this study is a qualitative descriptive. Data collection techniques used are interviews, observations and documents The theory used is the Van Meter and Van Horn implementation model, the model consisting. The research informants were 15 people. The results showed that the implementation of the Lembeh Strait tourism object development policy, South Lembeh District, Bitung City has not been carried out properly due to the difficulty of establishing communication with the surrounding community in terms of cooperation in maintaining and supporting development facilities and the implementation of planned activities. In implementing this policy, human resources are still experiencing obstacles. Inadequate and ineffective coordination with other agencies is caused by the agency's own department, and the agency assumes itself that this development task is only the task of the related institutions.

Keywords : policy implementation; development; tourism objects

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan pengembangan objek wisata Selat Lembeh Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung. serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Teori yang digunakan adalah model implementasi Van Meter dan Van Horn. Informan penelitian berjumlah 15 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Selat Lembeh Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung belum terlaksana dengan baik karena sulitnya menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar dalam hal kerjasama dalam pemeliharaan dan penunjang fasilitas pembangunan serta pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Dalam implementasi kebijakan ini, sumber daya manusia masih mengalami kendala. Koordinasi yang tidak memadai dan tidak efektif dengan lembaga lain disebabkan oleh departemen lembaga itu sendiri, dan lembaga tersebut berasumsi sendiri bahwa tugas pengembangan ini hanya tugas lembaga terkait.

Kata kunci : implementasi kebijakan; pengembangan; objek wisata

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wilayah Indonesia sebagian besar merupakan kawasan perairan dengan berbagai keindahan alam pesisir, laut dan keanekaragaman hayati yang sangat potensial untuk dijadikan tempat tujuan wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Pemerintah akan mengembangkan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), serta Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). KPPN ini di antaranya juga termasuk KSPN dan tersebar di 50 DPN. United Nation World Tourism Organizations (UNWTO) mengakui bahwa sektor pariwisata adalah sektor unggulan dan merupakan salah satu kunci penting untuk pembangunan wilayah di suatu negara dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat (Kemenpar, 2015).

Pariwisata merupakan sektor penting penunjang perekonomian. Pariwisata juga menjadi sarana pengembangan sosial budaya dan mempromosikan citra bangsa di luar negeri. Pariwisata di Indonesia merupakan sektor yang berkembang pesat, dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi terpenting. Sektor ini diharapkan menjadi nomor satu dalam hal pendapatan devisa.

Menurut Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai kegiatan pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pengembangan pariwisata tidak bisa hanya dilakukan oleh satu partai politik, tetapi sebagai bentuk otorisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang mensyaratkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat. Teori-teori pembangunan pariwisata yang dijelaskan di bawah ini merupakan perspektif pemikiran peneliti dalam mengimplementasikan topik penelitian. Teori yang digunakan akan menggambarkan bagaimana industri pariwisata mendukung perekonomian kota dengan mengandalkan sektor agrowisata (pertanian) yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Akibat pertumbuhan ini, pariwisata kini menjadi kebutuhan pendapatan per kapita dunia. Tiga revolusi "T" (*Technology Transport,*

telecommunications, and travel and tourism), yang dia berikan kemudahan dan kelancaran perjalanan di seluruh dunia, meninggalkan keluarga di rumah tanpa ragu-ragu. Menurut Visi Organisasi Pariwisata Dunia (WTO) 2020 di Villiers (1999: 14), pertumbuhan pariwisata sekarang rata-rata 4,1% pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia.

Indonesia sebagai negara dengan ribuan Selat dengan keindahan alam yang beragam dan jumlah penduduk yang terdiri dari ratusan suku bangsa memiliki potensi yang sangat besar baik dari segi wisata alam, sosial dan budaya (Dahuri dalam Labolo, 2011: 233). Potensi dan sumber daya alam yang ada sebaiknya dimanfaatkan dan disulap menjadi sarana wisata yang menarik. Daya tarik utama wisatawan yang berkunjung ke Indonesia adalah keindahan alam dan kekayaan budayanya, potensi ini sangat menarik untuk dikembangkan.

Jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahunnya rata-rata mengalami peningkatan. Adapun pengelompokan jenis objek wisata pengelompokan di Selat Lembeh dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu wisata bahari, religi atau budaya, ekowisata, dan event pariwisata (Festival Selat Lembeh). Pengembangan objek wisata pantai di Selat Lembeh ini, harus diimbangi dengan pengelolaan yang maksimal oleh Pemerintah Daerah karena sasaran yang ingin dicapai adalah berkebangnya kontribusi pariwisata yang begitu besar agar dapat menjadi tujuan wisata mancanegara yang siap bersaing ditingkat internasional (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah Daerah bawenang untuk mengelola kekayaan daerah yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik daerah yang bersangkutan. Strategi pengembangan objek wisata harus dituangkan dalam produk formal agar dapat diimplementasikan dan dievaluasi.

Kebijakan yang ideal tidak akan menjadi kebijakan yang baik apabila tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2014:657). Pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab mengatur, membina dan mengawasi serta mengendalikan penyelenggaraan pariwisata. Tujuan pengembanan kawasan wisata adalah untuk membangun dan mengembangkan

kepariwisataan berdasarkan azas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.

Dinas Pariwisata Kota Bitung memiliki beberapa langkah strategis demi memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki oleh Kota Bitung yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata (RIPPARKOT) Kota Bitung Tahun 2017 - 2025. Pokok dari RIPPARKOT adalah mengembangkan pariwisata berbasis wisata alam dan budaya dengan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya yang dilakukan melalui: Peningkatan sinergitas pariwisata dengan sektor potensial; Pengembangan obyek wisata potensial dengan meningkatkan aspek pemasaran pariwisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara; Pengembangan kapasitas masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan pariwisata yang bertumpu pada pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dan peningkatan infrastruktur pendukung bagi pengembangan kawasan pariwisata potensial.

Objek wisata merupakan kawasan fungsi utama dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata. Pengembangan kawasan harus melihat potensi yang dimilikinya dan menjadi daya tarik bagi konsumen wisata. Kriteria yang harus dipertimbangkan meliputi: Pemandangan panorama keindahan alam, potensi pertanian dan kekayaan alam yang unik dan menarik. Kekayaan budaya, tradisi dan adat istiadat yang bernilai tinggi, serta kebutuhan wisatawan. Peninggalan budaya dan nilai sejarah lainnya.

Kenyataannya implementasi pengembangan objek wisata Selat Lembeh dirasakan belum maksimal. Pengembangan wisata bahari tidak hanya fokus dari faktor sumberdaya alam saja, tetapi perlu memperhitungkan faktor lain yang tidak kalah pentingnya seperti, penyediaan fasilitas, aksesibilitas, keamanan dan sikap masyarakat sekitarnya dalam menerima kedatangan pengunjung.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ristiana (2016) terdapat temuan bahwa ada beberapa variabel yang masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan wisata bahari di wilayah pesisir Sulawesi Utara yaitu aksesibilitas yang masih buruk, kurangnya fasilitas, kurang seimbang partisipasi pemerintah dan LSM, pemasaran yang belum

maksimal dan belum ada pelatihan untuk peningkatan ekonomi kreatif serta kurangnya ketersediaan SDM yang handal terhadap para agen pelaksana yaitu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan keterbatasan sumber daya finansial yang menjadi penghambat keberhasilan implementasi kebijakan (Ristiana, 2016).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Jupir (2013:27-37) menyimpulkan bahwa efektifitas Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata (studi di Kabupaten Manggarai) lebih cenderung menggunakan pendekatan top-down. Akibatnya ruang partisipasi bagi masyarakat sangat terbatas. Serta dipengaruhi oleh kinerja implementator/agensi kebijakan belum optimal, terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia, ego sektoral yang masih sangat kuat, sehingga koordinasi dan komunikasi tidak berjalan efektif dan Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik yang membungkus sirkulasi kehidupan masyarakat cenderung menghalangi terjadinya Implementasi Kebijakan efektif.

Hal serupa juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan dan Pratidina (2015) pelaksanaan pembangunan bidang kepariwisataan di selama ini menghadapi masalah pokok yaitu: keterbatasan SDM kepariwisataan, baik secara kuantitas maupun kualitas (kompeten dan profesional); belum baiknya infrastruktur (sarana dan prasarana), khususnya akses jalan dan jaringan transportasi, menuju destinasi wisata sehingga berpengaruh terhadap kinerja sektor kepariwisataan; koordinasi lintas-instansi dan lintas-pelaku yang belum optimal.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui efektivitas implementasi kebijakan dan upaya pemerintah mempersiapkan tiap-tiap komponen pengembangan pariwisata di kawasan wisata Selat Lembeh serta penerapan mekanisme pengelolaan yang ada saat ini dalam upaya mempersiapkan kawasan wisata Selat Lembeh sebagai destinasi wisata unggulan.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Bitung provinsi

Sulawesi Utara (studi kasus di kawasan objek wisata Lembeh)?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Selat Lembeh menggunakan model implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn.

Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah

- a. Secara akademis, penelitian ini sebagai salah satu kajian ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan wilayah khususnya kebijakan publik.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta masyarakat, dalam mengelola objek wisata di masa yang akan datang, serta sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan objek wisata.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di Selat Lembeh Kecamatan Lembeh Selatan.

Metode Pengumpulan Sampel

Metode pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan objek wisata selat Lembeh di Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Argumen peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pertama, implementasi kebijakan sangat membutuhkan masukan serta saran yang dapat diwawancarai. Kedua, implementasi kebijakan pengembangan objek wisata selat Lembeh di Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan konseptual.

Fokus Penelitian

Implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini dinilai dari aspek - aspek implementasi kebijakan berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari:

1. Standar dan tujuan kebijakan, dimana tujuan pengembangan obyek wisata sudah sesuai dengan RIPPARKOT No 5 Tahun 2017 – 2025 dan dianggap dapat diterapkan pada masyarakat yang memperhatikan kemampuan implementor tentang standard tujuan kebijakan.
2. Sumber daya, ketersediaan tenaga kerja atau sumberdaya manusia serta keuangan atau finansial serta jangka waktu pelaksanaan pengembang obyek wisata.
3. Karakteristik agen pelaksana, yaitu pelaksana pengembangan obyek pariwisata Selat Lembeh yang mampu memberi pengaruh implementasi kebijakan serta kesiapan jumlah pelaksana implementasi kebijakan didasarkan pada luas wilayah pelaksanaan pengembangan obyek wisata. Pelaksana implementasi terdiri dari organisasi formal yaitu pemerintah Kota Bitung dalam hal Pramuwisata Kota Bitung.
4. Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, yaitu sikap pelaksana kebijakan dalam pengembangan obyek wisata.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana difokuskan pada sinergitas antar organisasi, baik dari pemerintah Kota Bitung yaitu Dinas Pariwisata Kota Bitung dengan pihak – pihak yang terlibat dalam pengembangan obyek wisata Selata Lembeh.
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, dimana memperhatikan lingkungan ekonomi, social dan politik yang dapat membantu keberhasilan proses pengembangn obyek wisata Selat Lembeh.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan para informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian diperoleh melalui dokumen - dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yaitu gambaran umum mengenai objek wisata Selat Lembeh RKPD dan Rencana Strategis pengembangan pariwisata Selat Lembeh, foto-foto dokumentasi, dan data-data terkait informasi Selat Lembeh, buku dan peraturan terkait kepariwisataan, Tupoksi Dinas Pariwisata Selat Lembeh, katalog destinasi wisata Selat Lembeh, serta data jumlah hotel/losmen/ villa/cottage di Selat Lembeh.

Informan Penelitian

Informan adalah individu atau kelompok yang dipercaya memiliki informasi tentang

pelaksanaan pembangunan obyek wisata di Selat Lembeh. Dalam mengidentifikasi informan, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. yang bertujuan untuk menemukan informasi dengan tingkat relevansi dan kredibilitas tenaga pengembangan obyek wisata Selat Lembeh.

Kelompok informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang terdiri dari :

- 1) Dinas Pariwisata Kota Bitung (3 orang)
- 2) Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung (1 orang)
- 3) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung (1 orang)
- 4) Himpunan Pramuwisata Kota Bitung (1 orang)
- 5) Pemerhati Wisata kota Bitung (1 orang)
- 6) Perangkat Kelurahan Selat Lembeh (1 orang)
- 7) Pengunjung/wisatawan objek wisata Pantai Selat Lembeh (3 Orang)
- 8) Masyarakat Kawasan Objek wisata Selat Lembeh (4 orang).

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu (Sugiyono, 2014). Selain itu, dalam menganalisis data yang diperoleh di lapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Kecamatan Lembeh Selatan terletak pada $1^{\circ}15'$ - $1^{\circ}25'$ lintang utara dan $125^{\circ}06'$ - $125^{\circ}72'$ bujur timur. Kecamatan Lembeh Selatan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Lembeh Utara
- Sebelah Timur dengan Laut Maluku
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Minahasa Utara
- Sebelah Barat dengan Selat Lembeh

Kecamatan Lembeh Selatan merupakan bagian dari sebuah pulau yakni Pulau Lembeh yang merupakan suatu punggung pegunungan yang panjang dengan ketinggian < 600 m dari permukaan laut yang terdiri dari material-material vulkanis muda. Di Kecamatan Lembeh Selatan Terbagi dalam 7 Wilayah Kelurahan dengan jarak dari Ibukota Kecamatan, yaitu :

1. Papusungan - Pasir Panjang 6,7 Km
2. Papusungan - Paudean 3,8 Km
3. Papusungan - Batulubang 1,5 Km
4. Papusungan - Dorbolaang 10,7 Km
5. Papusungan - Pancuran 17,3 Km
6. Papusungan - Papusungan 0 Km
7. Papusungan - Kelapa Dua 1,5 Km

Selat Lembeh merupakan wilayah administratif Kota Bitung di Provinsi Sulawesi Utara, dan terkenal di dunia penyelaman karena menjadi tujuan wisata selam paling populer di Indonesia. Selat tersebut memanjang hampir utara-selatan, memisahkan dua daratan, yaitu daratan utama Sulawesi dan pulau Lembeh yang membentang dari utara-selatan. Selat Lembeh telah dianugerahi gelar salah satu situs penyelaman terbaik untuk fotografi bawah air karena keunikannya yang mempesona dan keanekaragaman biota laut kecil yang spesifik. Karena itulah, tempat penyelaman ini dijuluki "surga fotografi makro bawah air", yang artinya ada banyak miniatur makhluk unik, langka dan menakjubkan atau gnome bawah air yang tersembunyi di balik karang dan puing-puing bawah air. Karena keunikan ini, fotografer bawah air profesional bahkan menyebutnya sebagai "pemujaan fotografi makro bawah air".

Pembahasan

Melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bitung Tahun 2013 – 2033 yang bertujuan untuk mewujudkan ruang kota yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional yang berbasis pada kegiatan bahari pemerintah kota Bitung menerapkan kebijakan untuk penataan ruang wilayah kota yang meliputi : perwujudan pusat-pusat pelayanan Kota yang bersinergi, efektif, dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota bahari; peningkatan peran kota bahari yang ditunjang oleh kegiatan industri, kelautan/perikanan, perdagangan/jasa dan pariwisata; pengembangan infrastruktur kota untuk mendukung kegiatan bahari berskala nasional yang terpadu dengan sistem regional; pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan; penetapan kawasan strategis wilayah kota dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah; dan peningkatan

fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara yang dilakukan pimpinan Dinas Pariwisata Kota Bitung, ibu VL mengatakan bahwa :

“Tidak bisa dipungkiri bahwa pariwisata di Kota Bitung paling besar berfokus pada obyek wisata bahari. Oleh sebab itu banyak sekali kegiatan – kegiatan untuk menarik wisatawan dilakukan yang bertema bahari. Lihat saja festival Selat Lembeh. Seperti yang jadi obyek penelitian bapak di selat Lembeh. Jujur saja, memang untuk saat ini, secara keseluruhan obyek wisata yang ada di Kota Bitung, terjadi penurunan kunjungan yang dikarenakan pandemic. Apalagi dengan kebijakan tentang 3M, kemudian kerja dari rumah serta jaga jarak, yang secara otomatis membuat wisatawan, orang – orang suka berplesiran ke tempat – tempat wisata mengurungkan niat untuk berkunjung ke tempat wisata. Saat ini pemkot Bitung, melalui Dinas Pariwisata sedang menyusun langkah – langkah strategis untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan termasuk pengembangan obyek wisata melalui pengadaan saran aprasarana pendukung.”

Senada dengan hal tersebut, peneliti mewawancarai pengelola obyek wisata di kawasan obyek wisata Selat lembeh. Hasil wawancara dengan OK, pengelola obyek wisata mengatakan bahwa :

“Kalau untuk kami sendiri sebagai pengelola mengalami kerugian itu pasti. Karena kami harus tetap mengurus kebutuhan obyek wisata yang kami miliki. Tentunya membutuhkan dana untuk pemeliharaan tapi untuk seperti masa sekarang kami mau tidak mau harus menggunakan modal sendiri. Karena mau bagaimana lagi, kita tidak mendapatkan pemasukan, ya.... walaupun ada tetap masih kurang untuk pemeliharaan. Bayar orang kerja, petugas kebersihan listrik dan dan lain – lain”. Harapannya mudah – mudahan pandemic covid-19 segera berakhir dan semoga secepatnya rencana pembangunan jalan,, jembatan yang menghubungkan langsung dari Bitung ke sini (Selat Lembeh) cepat terlaksa. Spya orang yang berkunjung bisa langsung menuju kesini tanpa lagi harus naik perahu. Alasannya karena kalau diperahu otomatis bergabung

dengan wisatawan lainnya sedangkan sekarang jaga jarak harus diterapkan.”

Hasil wawancara dengan masyarakat yang berada di kawasan objek wisata Selat Lembeh menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata pulau Lembeh secara keseluruhan untuk saat ini belum baik dan belum dikelola oleh pemerintah dengan maksimal, karena masih ada tempat-tempat wisata yang ada di Kecamatan Lembeh Selatan butuh perbaikan dan pembenahan. Namun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ada peningkatan dalam pengembangan pariwisata pulau lembeh. Hal ini seperti yang disampaikan oleh WS dan AJ yang mengatakan :

“Memang kalau dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, keadaan tempat wisata di sini (Selat Lembeh) memang lebih bagus. Tetapi kalau dilihat dari perkembangan sebenarnya tidak jauh berbeda, artinya masih banyak hal – hal yang perlu ditambah agar lebih bisa menarik wisatawan untuk dapat mengunjungi objek wisata di Selat Lembeh secara khusus. Bersyukur untuk saat ini akan dibangun jembatan yang menghubungkan Kota Bitung dengan Selat Lembeh. Kalau tidak salah proyek jembatan dimulai tahun ini (2020) bersamaan dengan proyek jalan tol. Mudah – mudahan saja secepatnya.”

Pemerhati wisata dan Himpunan Pramuwisata Kota Bitung, AW dan JG mengatakan bahwa :

“Tujuan pemerintah untuk mengembangkan obyek wisata, memang sudah seharusnya terlebih untuk obyek wisata di selat Lembeh. Vila, restoran, tempat diving, dan even – even bahari yang dilakukan, bagi kami ini menjadi daya jual dan daya ukur kemampuan obyek wisata di kota Bitung secara keseluruhan. Kalau untuk Selat Lembeh sendiri, dari namanya saja sudah di kenal Festival selat Lembeh, tentunya itu menjadi penilaian tersendiri untuk para wisatawan baik dalam negeri ataupun luar negeri. Salah satu kebijakan pemerintah pusat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membangun jembatan penghubung, kami kira itu menjadi satu solusi juga untuk pengembangan obyek wisata di Kota Bitung khususnya Selat Lembeh yang memang jadi primadona wisata Kota Bitung. Belum lagi, kalau di Selat Lembeh, spotnya bagus.

Sebelum adanya pandemic, lokasi wisata Selat Lembeh tidak pernah sepi, artinya tempat wisata disini selalu penuh wisatawan bahkan ada yang menginap sampai sehari – hari. Tapi, untuk sekarang pandemic jadi masalah. YA... mudah – mudahan secepatnya selesai dan pengunjung bisa kembali ke sini. Dan otomatis juga membantu UMKM yang ada di sekitar obyek wisata terbantu.”

Hal tersebut dibenarkan oleh masyarakat yang diwawacara, UT, LS, BL yang mengatakan bahwa :

“Pas masa corona begini, pendapatan kami berkurang jauh sekali. Karena sudah tidak ada yang datang berkunjung. Jualan yang biasanya kami jual ke pengunjung sekarang sudah tidak lagi. Kan walau pekerjaan utama nelayan, kan kalau ada sampingan yang dijual ke pengunjung bisa menambah biaya beli bumbu dapur. Tapi sekarang mau tidak mau Cuma berharap hasil jualan ikan. Mudah – mudahan secepatnya kembali normal.”

Oleh sebab itu kebijakan pengembangan objek wisata khususnya di Selat Lembeh Kecamatan Lembeh Selatan perlu untuk di implementasikan. Menurut perangkat kelurahan dan masyarakat sekitar obyek wisata, GO dan Ap mengatakan bahwa :

“Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bitung untuk pengembangan objek wisata merupakan langkah – langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan PAD tentunya. Namun memang masih terdapat beberapa hal yang harus dibenah. Dan tentunya itu harus ada kolaborasi bukan hanya dari pemerintah tetapi masyarakat juga dalam hal ini pengelola wisata ataupun orang disekitar kawasan objek wisata.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan yang tertuang dalam RIPPARKOT Nomor 5 Tahun 2017 – 2025 dijalankan sesuai prosedur yang disampaikan dan sesuai dengan standar pelaksanaan serta sesuai dengan tujuan kebijakan dimana kebijakan yang dibuat memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam hal ini, pengelola obyek wisata dan parawisatawan yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata dibantu orleth orgaisasi informal seperti Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Bitung.

a) Sumber daya,

Selain standar dan tujuan pelaksanaan kebijakan, sumberdaya juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sumberdaya yang dibutuhkan yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan kebijakan ini terdiri dari para petugas

pelaksana kebijakan yang tentunya berasal dari Dinas Pariwisata Kota Bitung sert adibantu oleh organisasi – organisasi dan pemerhati wisata. Menurut pimpinan dinas pariwisata, VL mengatakan bahwa :

“Sumberdaya manusia yang dimaksud tentunya bukan Cuma sekedar berapa banyak pegawai atau orang yangh dapat melaksanakan tugas atau kebijakan yang dibuat tetapi orang yang kompeten dengan tupoksi yang diberikan. Untuk dinas pariwisata, tentunya dibagi di berbagai obyek wisata tidak hanya di fokuskan disatu tempat saja, otomatis dikarenakan dibagi – bagi secara otomat tdk cukup. Oleh sebab itu kami mengadakan kerjasama dengan organisasi – organisasi bidang kepariwisataan untuk membantu pelaksanaan kebijakan yang dibuat. Untuk pendanaan kami tentunya difokuskan dari APBD Kota Bitung. Kalau untuk sarana prasarana penunjang yang skala besar, ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Misalnya untuk pembangunan jembatan ke Selat Lembeh, itu dibangun oleh pemerintah pusat bersamaan dengan proyek jalan tol. Kami hanya mebantu mengawasi namun itu lebih difokuskan oleh dinas pekerjaan umum.”

Berhubungan dengan pendanaan pembangunan dalam rangka pengembangan obyek wisata terutama dalam hal keuangan, peneliti mewawancarai pimpinan Bapeda Kota Bitung. Oleh GS mengatakan bahwa :

“Khusus untuk pembangunan jembatan yang menuju kearah Selat Lembeh, yang panjangnya 1 KM, itu membutuhkan biaya estimasti mencapai 500 milyar rupiah. Nah itu ditangani langsung oleh pemerintah pusat dibawah Kementerian PUPR. Untuk dari Bapeda sendiri, kas Kota untuk sekarang memang mengalami penyusutan. Sehingga PAD berkurang dan tentunya tidak cukup. Untuk pembiayaan disektor pariwisata, diambil dari APBD tapi tidak sepenuh diberikan sesuai permintaan dikarenakan harus juga dibagikan dgn SKPD lainnya. Ini semua karena corona. Tapi harus dicari solusi, dan untuk saat ini dikembalikan ke SKPD masing-masing.”

Sama halnya juga di sampaikan oleh ML, salah satu staf di dispar Kota Bitung yang menyampaikan bahwa :

“Biasanyakan kita bisa dapat bantuan dana dari retribusi yang dibagikan ke obyek – obyek wisata yang ada. Membantu PAD. Dengan adanya covid-19 ini, kunjungan bsa disimpulkan tidak ada kunjungan, otomatis pemasukan pun tidak ada.”

Hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa sumberdaya manusia dan finansial dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata di Selat Lembeh Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung tidak dapat memenuhi permintaan dalam hal ini dinas pariwisata. Dengan kata lain, pemerintah belum dapat membantu memberikan bantuan berupa dana intensif bagi pengelola obyek wisata. Khususnya di obyek wisata Selat Lembeh untuk membantu pengelolaan obyek wisata. Semua dikembalikan kepada pengelola obyek wisata masing – masing.

b) Karakteristik agen pelaksana,

Dalam menjalankan implementasi kebijakan untuk pengembangan obyek wisata di Selat Lembeh Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, diperlukan pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi termasuk *attitude* yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaan pemerintah Kota Bitung bekerjasama dengan organisasi informal seperti Himpunan Pramuwisata yang berada di Kota Bitung.

Hasil wawancara dengan pengurus HPI, AW mengatakan bahwa :

“Obyek wisata bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata. Tetapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat. Kami dari HPI merasa menjadi bagian dalam menangani obyek wisata, termasuk mempromosikan obyek wisata Selat Lembeh. Secara nasional Selat Lembeh sudah dikeal karena pernah melaksanakan even Festival Selat Lembeh. Itu menjadi daya jual. Namun yang terpenting disini juga, bagaimana pemerintah bersama kami dan juga msyarakat saling topang menopang untuk mengelola obyek wisata sesuai dengan kebijakan yang dibuat pemerintah. Oleh sebab itu komunikasi kami bangunn serta dari HPI sendiri bersama dengan pemerhati wisata yang ada di Kota Bitung, kami membantu mempromosikan bahwa obyek wisata di Kota Bitung tentunya untuk saat ini sudah berjalan meskipun harus dijalankan mengikuti anjuran pemerintah. Dimasa seperti ini, pengembangan obyek wisata harus dilakukan secara besar besaran termasuk sarana prasarana pendukung.”

Dapat dikatakan bahwa pelaksana kebijakan untuk pengembangan obyek wisata selat Lembeh tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung semata tetapi dibantu oleh organisasi – organisasi informal termasuk dalam proses

mempromosikan obyek wisata di Kota Bitung khususnya di Selat Lembeh.

c) Sikap/kecenderungan,

Dalam menyampaikan kebijakan yang dibuat, dalam hal ini tentang pengembangan obyek wisata Selat Lembeh, tentunya dibutuhkan kerjasama antar masyarakat dalam hal ini pengelola obyek wisata yang ada di Selat Lembeh dan pemerintah Kota Bitung. Sinergitas sangat dibutuhkan, dikarenakan pemerintah mempromosikan obyek wisata tentunya akan berdampak pada PAD Kota Bitung sendiri dan pada pengelola obyek wisata tentunya menambah pendapatan dari hasil pengelolaan obyek wisata yang dikelola. Hasil wawancara dengan JU, PK dan UD, pengelola wisata mengatakan bahwa:

“Pada saat ini kami memang pengelolala obyek wisata, banyak yang kelabakan. Karena mau tidak mau kami harus merogoh dana pribadi untuk pengelolaan dalam hal ini pemeliharaan obyek wisata yang kami kelola. Kami memahami akan situasi sekarang, dan kami juga berterima kasih dengan PemKot Bitung yang tetap menjaga sinergitas dengan kami. Hasil pertemuan yang kami lakukan bersama pemerintah, terdapat beberapa penyampaian solusi untuk pengembangan obyek wisata di tempat kami (Selat Lembeh), Salah satunya kami menayakan tentang rencana pembuatan jalan, akses yang dibuat dan disampaikan bahwa hal tersebut merupakan proyek nasional dan akan dibuat pemerintah pusat bersamaan dengan proyek jalan tol. Dan kami sendiri diminta untuk mempersiapkan akomodasi secara baik terlebih pada masa sekarang yang secara bertahap obyek – obyek wisata akan dibuka meskipun dengan protocol kesehatan. Intnya kami sinergitas dengan pemerintah untuk mengembangkan obyek wisata di Selat Lembeh.”

Senada dengan para pengelola obyek wisata, wisatawan yang ada ditemui dalam hal ini pernah datang ke obyek wisata Selat Lembeh sebelum adanya pandemic, Ibu RS, BD dan KO mengatakan bahwa:

“Pemerintah dan pengelola obyek wisata memang harus bekerja keras untuk mengembangkan obyek wisata di Selat Lembeh. Karena memang tempaya bagus – bagus. Dari pemerintah dan pengelola juga menyampaikan bahwa mudah – mudahan secepatnya jembatan penghubung ke Selat Lembeh selesai. Supaya kami juga ke Selat Lembeh lebih mudah. Dan itu yang selalu kami dengar dari teman yang kerja dinas pariwisata, bahwa sebagai promosi pariwisata di Selat Lembeh tidak lama lagi aka

nada akses yang mempermudah. Tidak perlu lagi naik perahu. Dan itu saya pikir bagus, untuk mempromosikan Selat Lembeh. Apalagi disampaikan dengan antusias dari petugas.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa, pelaksana kebijakan menyampaikan perihal sarana – prasarana serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan obyek wisata diterima dengan baik oleh pengelola obyek wisata Selat Lembeh serta masyarakat dalam hal ini para wisatawan.

d) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Komunikasi antar organisasi formal dan informal dapat berjalan dengan baik. Terdapat hubungan yang sinergis. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan pengurus HPI dengan Pimpinan dinas Pariwisata sebagai perwakilan pemerintah Kota Bitung dalam mengembangkan obyek wisata di Kota Bitung terlihat mereka saling mendukung. Dari pengurus HPI mengatakan “

“Bisa dikatakan bahwa kami sudah saling terikat. Sudah punya hubungan yang dalam. Ibarat orang kami sudah seperti kekasih (Sambil tertawa)...Pemkota melalui Dispar sangat sering menghubungi dan mengundang kami untuk membicarakan tentang upaya untuk mengembangkan obyek wisata di Kota Bitung secara keseluruhan buan hanya Selat Lembeh”.

Hal tersebut dibenarkan oleh Pimpinan Dispar Kota Bitung VL. Yang mengatakan bahwa:

“Kami tentunya tidak bisa apabila hanya mengandalkan kami saja, kami harus membina hubungan dengan organisasi yang tentunya dapat membantu pekerjaan kami terlebih obyek wisata, untuk Kota Bitung yang lebih dikenal dengan lokasi wisata bahari, tentunya kami membutuhkan kerjasama dengan organisasi. Kerjasama itu perlu dan harus.”

Kesimpulannya adalah koordinasi antar organisasi dalam hal ini pemerintah Kota Bitung terjalin baik dengan organisasi diluar pemerintah dalam hal ini Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Bitung serta para pemerhati wisata di kota Bitung.

e) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Hasil wawancara dengan perangkat dan masyarakat di kawasan obyek wisata selat Lembeh menunjukkan bahwa, kebijakan pemerintah tentang sarana prasarana untuk mengembangkan obyek

wisata di kota Bitung khususnya di Selat Lembeh, merupakan hal yang baik dan ditunggu – tunggu. Hasil wawancara dengan ST, AH dan RK mengatakan bahwa :

“Obyek wisata di Selat Lembeh tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena keindahannya memang luar biasa. Mengenai rencana pemerintah membuat jembatan langsung ke Selat Lembeh, menurut kami merupakan kebijakan yang tepat untuk pengembangan obyek wisata di Selat Lembeh. Untuk kami sendiri, tentunya dari segi ekonomi akan sangat membantu kami yang memiliki UMKM di sekitar obyek pariwisata. Kalau sekarang kan, sebelum pandemic, orang – orang kalau mau berkunjung tentunya harus melewatinya harus pakai perahu, memang untung untuk pengemudi perahu, tapi untuk kami yang jualan makanan begitu, kami tentunya agak susah. Karena kebanyakan sudah mempersiapkan dari rumah atau membeli dilokasi sebelum naik perahu. Tapi kalau sudah ada jembatan, pengunjung tidak repot lagi untuk membayar perahu atau belanja makanan di luar, mereka bisa lebih menghemat biaya perahu dan uangnya bisa dibelikan makanan yang kami jual”.

Menurut perangkat kelurahan, HM, mengatakan bahwa:

“Sebelum ada corona memang banyak orang datang kesini, tetapi sedikit yang membeli di warung – warung dekat obyek wisata. Karena ada yang mengatakan bahwa, uang sudah habis karena sudah bayar perahu. Belum untuk balik lagi. Jadi dengan kata lain, kalau sarana pendukung sudah jadi, menurut saya pendapatan masyarakat di sekitar obyek wisata pasti meningkat. Kan tidak semua orang data hanya langsung ke resort. Ada yang sekedar berkeliling. Mudah – mudahan secepatnya yang drencanakan pemerintah terlaksana cepat.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata Selat Lembeh Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung menggunakan tolak ukur teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan van Horn tidak terlaksana dengan

baik. Adapun aspek – aspek implementasi kebijakan yaitu:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan tertuang dalam peraturan daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang RIPPARKOT Tahun 2017 2025. Dalam RIPPARKOT ditetapkan tentang pengembangan fisik berupa pembangunan infrastruktur jalan namun pada kenyataannya pembangunan jalan belum berhasil sedangkan untuk akomodasi obyek wisata sudah berhasil. Tujuan kebijakan ini oleh para pelaksana dipahami sebagai pengembangan kegiatan rekreasi yang mengarah pada pelestarian pantai dan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini pengelola obyek wisata dan masyarakat sekitar.

2. Sumberdaya

Sumberdaya dalam implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata Selat Lembeh disimpulkan bahwa belum tersedia secara optimal., hal tersebut dikarenakan minimnya profesionalisme petugas pelaksana serta sumber dana / finansial yang minim.

3. Karakteristik agen pelaksana

Para agen pelaksana dari Dinas Pariwisata Kota Tomohon menjalankan tugas untuk menopang pengembangan obyek wisata Selat Lembeh terkoordinasi dengan baik yang secara internal maupun eksternal Dinas Pariwisata Kota Bitung.

4. Sikap/kecenderungan

Sikap pelaksana kebijakan pengembangan obyek wisata Selat Lembeh Kota Bitung dapat dikatakan belum optimal hal ini dilihat dari sikap pegawai tentang kebijakan yang dirumuskan. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya komponen pendukung yang belum memenuhi kebutuhan pengimplementasian kebijakan yaitu sumbe daya finansial dalam menjalankan kebijakan terutama pada pembangunan infrastruktur jalan.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Proses mengimplementasikan kebijakan pengembangan obyek wisata Selat Lembeh, terjalin secara baik, hal tersebut dilihat dari koordinasi yang dilakukan baik secara formal (sosialisasi) maupun informal (diskusi) meskipun dengan itensitas yang kurang.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Kondisi lingkungan dipengaruhi dari luar dalam pengimplementasian kebijakan pengembangan obyek wisata Selat Lembeh seperti pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan pengnapan yang terlihat sudah siap, sehingga tidak diperoleh alas an untuk menentang kebijakan pengembangan obyek wisata Selat Lembeh.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran penelitian ini adalah:

1. Pemerintah harus menyelesaikan ketersediaan sumber daya manusia di industri pariwisata dimana pemerintah menambah SDM yang memiliki kompetensi dibidang pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata di Kota Bitung umumnya dan di Selat Lembeh khususnya;
2. Meningkatkan aksesibilitas ke tempat wisata di Selat Lembeh sebagai upaya pembenahan sarana prasarana yang diprioritaskan.
3. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dibidang pariwisata dengan menggandeng OPD, para pengelola tempat wisata, serta asosiasi yang bergerak dibidang pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. PP No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional.
- Anonim. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
- Anonim. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Kementrian Pariwisata, 2015. Rencana Strategis, Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata 20115-2019. (diunduh november 2019). http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Renstra%20Deputi%20PDIP3_0%20versi%20pdf.pdf.
- Labolo, Muhadam. 2011. *Kepemimpinan Bahari: Sebuah Alternatif Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Susantono, B. 2004. *Langkah Kecil Yang Kita Lakukan Menuju Transportasi Yang Berkelanjutan*. Jakarta: Masyarakat Transportasi Indonesia